BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika di suatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat pula mengakibatkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsi narkotika yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengawasan dan anjuran yang sesuai yang diberikan tenaga medis untuk kepentingan pengobatan yang dikehendaki dengan menggunakan narkotika sesuai takaran dan pengawasan yang ketat bagi tenaga medis yang memberikan narkotika terhadap pasien guna kepentingan medis.

Berkaitan hal tersebut, untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkotika, dimana saat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember tahun 2009.

Tujuan dari lahirnya Undang-undang tentang narkotika yaitu :

- a. Mencegah segala bentuk peredaran dan penggunaan narkotika
- b. Melindungi masyarakat dari ancaman narkotika
- c. Menindak pelaku peredaran dan penggunaan narkotika.

Narkotika merupakan kejahatan internasional dan transnasional dimana kejahatan yang disebut ialah melibatkan lebih dari satu negara, meluasnya tindak kejahatan transnasional tersebut telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Sehingga salah satu yang menjadi poin perjanjian dari anggota ASEAN dalam menangani kasus ini diawali dengan pertemuan di Yangoon, Myanmar pada bulan Juni 1999. Kemudian Tahun 2000, di Wina, ASEAN mengikuti *7th Session of The Adhoc Committee on The Ellaboration of a UN Convention Againts Transnational Organized Crime* kemudian ini terus berlanjut hingga *Asia Pacific and Middle East Regional Conference & High Level Prosecutors Meeting* yang berlangsung di Istana Negara, Kamis 17 Maret 2011.¹

Mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, kejahatan tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang masuk kategori *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yaitu kejahatan yang mendapat prioritas dalam penanganannya seperti kejahatan-kejahatan teroris, ilegal logging, perjudian, korupsi, dan *money loundy*. Di era ini kemajuan bidang teknologi dan informasi serta media massa yang begitu cepat berakibat

¹<https://buanaajurnal.wordpress.com/2013/06/28/kejahatan-transnasional-narkotika-di-hubungkan-dgn-kerjasama-asean-multi-m-adha-sh/-di> unduh tanggal 3 Oktober 2017

tersebar nya psikoaktif di kalangan masyarakat luas semakin dikenalkannya zat psikoaktif oleh masyarakat luas.²

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sudah cukup banyak pelaku yang terjerat dalam undang-undang ini. Penegakan hukum diharapkan sebagai faktor penanggulangan pencegahan meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba bagi seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba, sanksi yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksinya berupa pidana penjara dan denda, serta juga paling utama adalah dikenakan batas minimum ancaman pidana dan adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang tindak pidana narkoba.

Harus disadari bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam hal tersebut maka bagi aparat penegakan hukum mempunyai peran penting terhadap kasus tindak pidana narkoba yang beredar, peran penegakan hukum terhadap peredaran narkoba ialah penyidik, dalam hal ini penyidikan oleh BNN (badan narkoba nasional). Adapun tugas dari penyidik diharapkan mampu membantu dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba yang sebagaimana penegakan hukum yang diterapkan sesuai undang-undang bahwa narkoba merupakan bahan atau obat terlarang dan barang siapa yang membawa, memiliki, menyebarkan, menjual belikan secara ilegal maka akan dijerat sesuai pasal yang berlaku yang mengatur undang-undang tindak pidana narkoba.

² Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Gafindo Persada. hal 92

Penyidikan oleh BNN yang dilakukan dengan berkoordinasi kepolisian Negara Republik Indonesia, ada pun tugas dan wewenang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu BNN yang di atur Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN merupakan sebuah lembaga non kementerian Indonesia BNN merupakan tugas utama dan pertama dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yang mempunyai peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, bahan adiktif lainnya dan mempunyai tugas merehabilitas bagi pecandu narkotika agar bagi pencandu dapat terlepas dari ketergantungan ataupun pengaruh dari narkotika.

BNN yang didirikan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi kepolisian Negara Republik Indonesia BNN sebagai lembaga pemerintah non kementerian, peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2007 sebelum BBN merupakan lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan BNN memiliki visi yaitu, mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. BNN juga diharapkan dapat mengoptimalkan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional jaringan narkotika. Dimana BNN sengaja dibentuk karena maraknya peredaran narkotika di Indonesia maupun lintas internasional beredar sangat besar, dalam hal ini BNN sangat berperan penting dalam kasus tindak pidana narkotika. BNN

dibentuk diharapkan angka penggunaan maupun peredaran gelap narkoba berkurang.

Peranan pemerintah juga merupakan sangat penting terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan masyarakat Indonesia, peran pemerintah dalam hal menangani kasus tindak kejahatan narkoba untuk meningkatkan produktifitas yang menghambat jalannya peredaran narkoba dan penjualan narkoba secara ilegal melalui jalur udara, darat, laut yang menjadi sasaran utama bagi sindikat gelap pengedar narkoba, dengan adanya jalur yang bisa di lewati bagi sindikat peredaran gelap narkoba dan kelalaian para penegak hukum serta pemerintah maka korban pengguna narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, serta ada pun penegak hukum sendiri ada yang mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya.

Penyalagunaan narkoba mengakibatkan dampak pada kejiwaan, gangguan tingkah laku, depresi, mudah tersinggung, rasa cemas, badan semakin kurus, hilangnya konsentrasi, hilangnya kepercayaan diri, menghalalkan berbagai cara dengan berbuat berbohong kepada orang tua serta menimbulkan tindakan kriminalitas kejahatan seperti kejahatan mencuri agar bisa membeli narkoba serta berdampak pada sosial mengakibatkan pengguna narkoba yang acuh tidak peduli di lingkungan sosial sehingga tidak bisa hidup bermasyarakat cenderung menyendiri, dampak penyalahgunaan narkoba yang paling bahaya yaitu berujung kematian yang sia-sia yang berakibat overdosis.

Faktor dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika biasanya dikarenakan, pergaulan lingkungan sekitar, depresi masalah pekerjaan maupun rumah tangga, kurangnya kasih sayang perhatian dari orang tua disebabkan banyaknya orang tua yang sibuk bekerja yang lalai akan memperhatikan serta mengurus kewajiban sebagaimana mestinya mengasuh anak. Orang tua yang cenderung sibuk dengan pekerjaannya cenderung menganggap materi dan uang sebagai bentuk pemberian kasih sayang mereka terhadap anaknya padahal uang dan materi yang diberikan secara berlebihan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang terhadap anak.

Terjadinya penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan masyarakat, tentu saja sangat merusak tatanan pelaksanaan produktifitas perkembangan generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan berbagai kalangan tentunya membahayakan bagi seluruh lapisan masyarakat serta alasan ekonomi yang mendorong seseorang ataupun sekelompok orang untuk melakukan bisnis haram narkotika demi mendapatkan keuntungan materi.

Indonesia saat ini dalam kondisi darurat penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika tak lagi kenal usia dan status, mulai orang biasa hingga beberapa pejabat terungkap terindikasi mengkonsumsi barang haram tersebut. Secara nasional, kerugian atas penggunaan narkotika jauh lebih besar mencapai Rp 72 triliun. Dari hasil pemetaan, pengguna narkotika sebagian besar berusia antara 10 tahun hingga 59 tahun. Pengguna laki-laki dengan perempuan, 70 banding 30 persen. Meski jumlahnya kecil, terdapat korban anak usia dini yang kebanyakan berasal dari keluarga pengguna narkotika.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Jateng, Susanto mengatakan, jumlah pertumbuhan penyalahguna narkoba di Jawa Tengah tahun 2016 juga berhasil ditekan kan angka pertumbuhan hampir sama dengan level nasional, yakni 0,03 persen. Tahun lalu, pengguna narkotika di Jawa Tengah mencapai hampir 600 ribu orang, dengan nilai kerugian sekitar Rp 7 triliun, Penyalahguna narkotia 90 persen akibat pengaruh lingkungan.

Dari ribuan kasus yang diungkap itu, rata-rata berupa peredaran narkotika, diantaranya ekstasi, sabu, ganja, hingga obat-obat berbahaya lainnya. Ini termasuk pil-pil obat keras yang peredarannya harus dengan resep dokter. Pengawasan obat atau bahan yang rawan disalahgunakan juga dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Eko Widodo mengungkapkan, salah satunya pengawasan ketat terhadap peredaran prekursor. Sebab, prekursor rawan disalahgunakan, diekstrak jadi sabu yang termasuk narkotika.³

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL JAWA TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah atau sering disebut problematika merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, sering peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang jelas

³http://krjogja.com/web/news/read/18066/2016_Pengguna_Narkoba_di_Jateng_Meningkat_0_03_Persen diunduh tanggal 28 September 2017

sehingga proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang di alami penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah dan cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan, dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan pelaku tindak pidana di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dialami penyidik dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini anatara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil peneliti diharapkan dapat bahan sumbangan bagi pengembangan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai peranan

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum, khususnya tentang peranan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika .

1. Manfaat praktis:

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan, masukan terutama penegakan hukum dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Badan Nasional Narkotika Jawa Tengah.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat yang luas mengenai penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

E. Terminologi

Adanya suatu penegakan hukum yang didirikan guna untuk kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadilan, hukum tertulis yang sengaja dibuat untuk mengatur masyarakat agar tertib dan patuh terhadap hukum, apabila hukum dilanggar maka akan memperoleh sanksi berupa denda maupun penjara. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana biasanya disebut dengan tindak pidana. Suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku maka

penegakan hukum bertindak sebagaimana mestinya penegakan hukum untuk mengatur jalannya suatu peraturan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang berlaku saat ini. penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyalurkan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam

masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.⁴

Adanya suatu pidana, dengan otomatis didahului adanya tindak pidana. Pengertian hukum pidana menurut Marzeg adalah aturan-aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana⁵.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) tindakan kriminal merupakan perbuatan kejahatan bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Tindakan kriminal atau kejahatan dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan

⁴ <http://acceleneun.blogspot.co.id/2013/03/pelaksanaan-dan-penegakan-hukum.html>
diunduh tanggal 5 Oktober 2017

⁵Surtarto, *Diktat Hukum Pidana 1*, Undip, Semarang 1991, hal. 9

pidana. Sedangkan dalam kriminologis adalah perbuatan manusia yang melakukan tindak pidana pemerkosaan atau menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkrit.

Pengertian Tindak pidana menurut Djoko Prakoso, perbuatan yang di larang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶

Istilah tindak di dalam tindak pidana adalah merupakan berasal dari singkatan tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan sesuatu yang berupa tindakan, sedangkan orang yang melakukan tindakan tersebut yang dinamakan petindak. Tindakan yang dilakukannya harus bersifat melawan hukum dalam hal ini berupa melanggar ketentuan yang terdapat di undang-undang yang sudah di sahkan dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan yang menidakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur tindak pidana narkotika tentang hukum dan ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika yang terdapat di undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 adalah:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, di pidana dengan penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 12 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

⁶Djoko Prakoso, *Tuntutan dan Eksaminasi perkara di dalam proses pidana*, liberty, Yogyakarta, 1998, hal.123

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷

Dari pengertian yang luas tentang perbuatan tindak pidana, pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan dalam hukum pidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁶ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

⁷ Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah,perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si pembuat.⁸

⁸ Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana II*, Hukum Undip.1984,hal. 37

penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan pasti terdapat faktor pemicu untuk menggunakan atau menyalagunakan narkotika. Pemicu terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat disebabkan antara lain oleh :

1. Kondisi keluarga yang tidak harmonis.

Kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anggota keluarga khususnya yang masih remaja dapat terjerumus pada pergaulan yang tidak baik karena depresi di dalam jiwanya, sehingga melakukan pengenalan pada narkoba. Hal ini merupakan bentuk pelarian diri terhadap permasalahan yang dihadapi.

2. Salah satu anggota keluarga yang berada dalam satu rumah telah kecanduan minuman alcohol atau memakai obat secara berlebihan. Adanya anggota keluarga yang berada dalam satu rumah dan telah memiliki kebiasaan dalam penggunaan narkoba, maka dapat dipastikan ada anggota keluarga lain yang ikut terjerumus. Hal tersebut bias dikarenakan diajari ataupun mencoba meniru kebiasaan yang sering mereka lihat dalam keseharian.

3. Berkawan dengan orang yang tergolong peminum berat atau memakai obat secara berlebihan. Teman merupakan unsur utama penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Untuk itu dalam memilih teman haruslah dengan teliti, apakah teman tersebut merupakan pemakai obat secara berlebih atau tidak. Apabila kita berteman dengan orang

pemakai obat pasti nantinya kita juga akan terjerumus dan mengikutinya.

4. Sudah mulai merokok pada usia yang lebih dini daripada perokok-perokok lainnya. Perokok muda, dengan mudah dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkotika, karena tanpa disadari telah ditawarkan rokok yang mengandung narkoba dan pada akhirnya menjadi pecandu.
5. Kehidupan keluarga atau dirinya kurang religious.

Kehidupan yang religious diharapkan menjadi benteng yang kokoh untuk menghindari perilaku yang tercela, dengan demikian anggota keluarga akan mengatakan tidak untuk narkotika

Menurut Shalih bin Ghanim As-Sadlanterdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong penyalahgunaan narkotika, antara lain :

- a. Tekanan ekonomi dan mata pencaharian.
- b. Pelampiasan harta yang berlebih-lebihan.
- c. Kegemaran untuk mencoba-coba sesuatu yang baru.
- d. Ingin menjadi pusat perhatian teman dan meniru tokoh idola.
- e. Untuk mengisi kekosongan waktu dan berteman dengan anak nakal.
- f. Untuk menyembukan penyakit tanpa petunjuk ahli medis.
- g. Untuk meningkatkan kreatifitas kerja atau menambah tahan begadang semalaman.
- h. Presepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang dapat merangsang birahi.
- i. Presepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang hukumnya tidak haram.

j. aktor utama, yaitu lemahnya pembinaan agama.⁹

Adapun tugas dan kewenangan dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah BNN. Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka, dibentuk suatu badan yaitu BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga pemerintah nonkementrian sebelumnya bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang disingkat LPND. Lembaga nonkementrian adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementrian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan Pasal 65 dan 66 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa BNN berkedudukan di ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara RI. Dengan dibentuknya BNN diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas sampai keakar-akarnya. Dalam menjalankan tugasnya, BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal.

Pasal 31 Perpres No. 23 Tahun 2010, menyebutkan bahwa instansi vertikal BNN terdiri dari BNN Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP dan BNN

⁹ Shalih bin Ghanim As-Sadlan, 2000, *Bahaya Narkotika Mengancam Umat*, Jakarta, Darul Haq dalam Trisno Raharjo, 2002, hal. 44-45

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK/Kota. BNNP berkedudukan di ibukota provinsi sedangkan BNNK berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pasal 33 menyatakan bahwa BNNP mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. BNNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

F. Metodologi Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian sangatlah penting karena disamping untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metodologi Pendekatan

Metodologi yang digunakan dalam penulis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti yaitu penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional di Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang

dikaitkan dan analisa dengan teori-teori ilmu hukum.¹⁰ Serta suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat mengenai peranan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

3. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini di ambil melalui data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber instansi BNN Jawa Tengah, dengan sebelumnya telah mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh instansi terkait.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari fakta-fakta yang telah ada, literatur atau buku-buku referensi yang membahas masalah pemidanaan narkoba, internet, data arsip dari insatansi yang digunakan sebagai penelitian, perundang-undangan yang membahas tentang narkoba, pendapat para pakar dan praktisi hukum, serta sarjana yang bergerak di bidang hukum atau di bidang lainnya yang berkaitan. Data sekunder dapat penelitian ini dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu:

¹⁰ *Ibid hal, 12*

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - c. Kitab undang-undang hukum pidana
 - d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana
 - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - f. Peraturan perundang lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang peranan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional.
 - b. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah peranan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional .
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dan literatur maupun studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian interview, yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu peranan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional, serta melalui pustaka (*library research*).¹¹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan KUHPA.

5. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data mengenai sebab-sebab terjadinya dan dampak sosial akibat penyalahgunaan narkoba di BNN, begitu juga upaya-upaya penegakan hukum mengenai masalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, bagaimana solusi penanganan dalam masalah hal tersebut. Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang penyalahgunaan narkoba di BNN Jawa Tengah.

¹¹ Ibid, hal. 53

H. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematika dalam pembahasan penelitian, penulisan mengemukakan penelitiannya yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka tentang penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana, penerapan sanksi, penertian narkotika, macam-macam bentuk narkotika, peranan BNN dalam mencegah bahaya narkotika, jenis-jenis Narkotika menurut golongan yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan narkotika, dan prespektif Hukum Islam Mengenai Narkotika.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian dan analisa data yaitu penegakan hukum tindak pidana

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan kalangan remaja di badan narkotika nasional Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh isi materi yang dirumuskan dalam bab-bab serta saran sebagai kemungkinan untuk memberikan masukan baru kusunya mengenai akibat hukum penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika di BNN Jawa Tengah.